

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.1 Perpajakan

Sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang perpajakan, kita akan merujuk beberapa teori tentang perpajakan. Buku pengantar ilmu hukum pajak karya R. Santoso Brotodihardjo, S.H. terdapat 5 teori yang mendasari negara untuk memungut pajak, adapun teori perpajakan sebagai berikut :

### 1. Teori Asuransi.

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya penjaminan asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran premi. Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap warga negara, tidak sekadar kepada masyarakat pembayar pajak saja. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dari teori asuransi sehingga teori ini semakin kehilangan penganut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Kepentingan.

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. Teori ini pun menuai banyak sanggahan berkaitan dengan konsepnya yang lebih condong kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari teori ini adalah belum ditemukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga ditinggalkan.

## 3. Teori Asas Gaya Pikul.

Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Prof. W. J de langen mendefinisikan gaya pikul sebagai kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya. Gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini, teori ini masih dipertahankan meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama oleh keluasan makna gaya pikul itu sendiri dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus dibebankan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak Atau Teori Bukti.

Teori ini muncul berdasarkan paham *organiscche staatsleer*, sehingga karena sifat negara inilah timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan disegala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut, dilain pihak individu-individu tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan negara.

#### 5. Teori Asas Gaya Beli.

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat menitik beratkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan negara. Teori ini lebih cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur (*reguler* atau *repricing*) dari pemungutan pajak, Herry Purwono (2010: 5).

Teori perpajakan di atas merupakan landasan untuk memungut pajak dari rakyat untuk rakyat yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama, namun teori asas gaya pikul merupakan teori yang sering digunakan hingga kini, walaupun masih ada perdebatan tentang teori ini.

Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pengertian pajak yang sifatnya universal. Dari sudut pandang yang berbeda, masing-masing sarjana yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Namun walaupun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Berikut beberapa diantaranya :

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Kemudian pengertian pajak juga dikemukakan S.I. Djajdiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang meberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

N. J. Feldman juga mengemukakan tentang pajak:

Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Siti resmi, (2014: 1).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja juga menyatakan:

pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

R. Santoso Brotodihardjo (2003) didalam Herry Purwono (2010: 6), leroy Bealieu, dalam *Traite de la science des finances* tahun 1906, menyatakan pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah

Dari devinisi di atas Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga penggunaan istilah “paksaan” yang terdengar seakan-akan memberi kesan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dapat dihindari. Sementara itu, mengenai “kontraprestasi” mempunyai pendapat bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukan bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman dan pembangunan yang merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

Pajak apabila ditinjau dari segi Mikro Ekonomi, merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hal tersebut otomatis dapat mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli dan kesejahteraan seseorang serta dapat merubah pola hidup wajib pajak. Namun dari segi Makro Ekonomi, uang pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) yang diterima pemerintah dan akan dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat. Ayu Ika Novarina (2005).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Mardiasmo (2016: 3). Dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Diana Sari, (2013: 44).

Berdasarkan Undang-Undang ini Konsekuensi terhadap pasal tersebut adalah bahwa pungutan pajak yang dilakukan haruslah didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, pajak apabila ditinjau dari segi hukum akan mempunyai batasan pengertian sebagai berikut, Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang (baik dalam pengertian *natuurlijk persoon* maupun *recht persoon*) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang pada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa, unsur-unsur pajak meliputi :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada masyarakat (kepentingan umum)
2. Ada undang-undang
3. Pemungut pajak (pemerintah)
4. Subjek Pajak (wajib pajak)
5. Objek pajak (*tatbestand*)
6. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak haruslah memenuhi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas legal, bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan indonesia, hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam Pasal 23 A UUD 1945, yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
2. Asas kepastian hukum, bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyeludup pajak.
3. Asas efisien, bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, suatu jenis pungutan pajak harus efisien, dimana biaya pemungutannya harus lebih kecil dibandingkan penerimaan pajaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas *non* distorsi, bahwa pajak harus tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak diharapkan tidak menimbulkan kelesuan ekonomi. Misalnya alokasi sumber daya dan inflasi.
5. Asas kesederhanaan (*simplicity*), bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana (tidak kompleks) sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus* maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.
6. Asas Adil, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan aspek keadilan dengan melihat kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*), Ayu Eka Novarina, (2005).

Menurut buku perpajakan teori dan kasus karya Siti Resmi, mengungkapkan asas pemungutan pajak meliputi 3 (Tiga) asas yang mendasari pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya bukan berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia. Siti Resmi, (2014: 10).

selain itu menurut Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas, yaitu:

#### 1. *Equality*

Harus ada keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memerhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta wajib pajak dari pemerintah. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

##### a. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

##### b. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus di bayar, dan waktu pembayaran. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memerhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus sminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya yang akan di kembangkan, sedangkan pajak yang kecil memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan. Supramono, dkk, (2010: 3).

Pada hakikatnya tujuan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari tujuan negara. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu maka tujuan dan fungsi pajak tersebut haruslah diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

### 2.1.1 Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Jadi fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

#### 2.1.1.1 Fungsi *Budgetair*

fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengan pajak dipandang dari sudut pandang ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduk.

Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara lain adalah :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak salah interpretasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

2. Tingkat intelektual masyarakat.

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan.

3. Kualitas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan, teknis dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Dan petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak sistem administrasi memegang peranan penting. Unit-unit penting kunci strategis dalam organisasi peng-administrasian (KPP) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang ter-integrasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal ini penerimaan jawaban konfirmasi, Diana Sari, (2013: 39).

#### 2.1.1.2 Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Reguler* adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalanya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang di khusus ditujukan kepada masalah tertentu dan memiliki fungsi lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan dan fungsi demokrasi. Diana Sari, (2013: 39).

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu oajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *badgetair*. Disamping untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut juga fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi pajak, yaitu fungsi *badgetair*. Sony Devano, (2006: 25).

### 2.2 Kepatuhan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah di setuju masyarakat melalui pewartilannya di dewan perwakilan, dengan

menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machmud Sidik) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110).

Menurut kamus umum bahasa indonesia (1995: 1013) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Berikut para ahli mengemukakan mengenai kepatuhan wajib pajak.

Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) didalam Soni Devani, dkk, (2006:110), mengemukakan makna kepatuhan wajib pajak suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian Nurmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Semntara menurut Chaizi Nusucha didalam Soni Devani, dkk, (2006:110), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Soni Devani, dkk, (2006:110).

Menyoroti kepatuhan pembayar pajak seharusnya menjadi *concern* bersama. Sekalipun negara sudah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam menghitung besaran pajaknya, tingkat kepatuhan masyarakat perlu tetap dikaji dan ditingkatkan terus-menerus. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak Patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

### 2.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan negara dalam prinsipnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan negara. Dalam Safriana dkk (2016) pada mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat disuatu negara. Seperti di Negara Indonesia pajak merupakan paksaan bagi rakyatnya, hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan pembagunan disebuah negara. Kewajiban pajak juga diatur dalam peraturan negara yaitu dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan pajak mempunyai peran sangat dominan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak semakin lama semakin meningkat dibanding dengan jumlah penerimaan lainnya. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel dan mudah dipengaruhi oleh peraturan Negara dibandingkan dengan penerimaan Negara bukan Pajak. berdasarkan sifatnya yang demikian maka pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang selalu diupayakan pengotimalanya guna untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga pembangunan Nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Menurut Andy (2012) adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat dibidang perapakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.4 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) baru-baru ini kembali mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016. Upaya ini dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik, dengan diharapkan partisipasi masyarakat dan negara untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atas pajak yang harusnya terutang dan semua sanksi-sanksinya dengan mengungkapkan harta yang ada didalam maupun

di luar negeri dan membayar uang tebusan. Adanya kebijakan ini diharapkan menambah kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga penerimaan pajak semakin meningkat dan dapat mempercepat proses pembangunan nasional.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak pribadi dan badan untuk pengapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi, pengapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

*Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang pernah melakukan pelanggaran perpajakan dimasa lalu. *Tax Amnesty* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Disamping itu, mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan lagi pajaknya secara benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajka dimasa depan.

*Tax amnesty* sebelumnya pernah dilakukan di Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui penetapan Presiden No.5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan Presiden (Kapres) No. 26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak dan Kapres no. 72 tahun 1984 tentang perubahan keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak. sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *tax amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 15). Kegagalan dua kali tersebut juga dikarenakan kurang adanya penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas pasca *tax amnesty* (Tambunan, 2015).

Pemerintah per tanggal 1 Juli 2016 kembali secara resmi meluncurkan program pengampunan pajak Nasional dan Presiden Jokowi berharap masyarakat wajib pajak memanfaatkan fasilitas baik untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak baik kewajiban pajak pribadi maupun perusahaan (*corporate income tax*) program bukan hanya ditunjuk kepada kalangan tertentu saja, misalnya kalangan konglomerat hitam sang pengemplang pajak, namun berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang selama ini enggan untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik dan benar atau yang juga sudah membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya namun dengan setengah hati, dan bahkan bagi mereka yang sudah tertib dalam membayar dan melaporkan SPT sekali pun tetap membutuhkan kemudahan dari Pemerintah ini, (Faisal 2016:4).

Setidaknya ada lima fasilitas dan proteksi yang diberikan oleh pemerintah yang disetujui oleh parlemen ini dalam rangkaian pelaksanaan program *Amnesty* pajak ini, (Faisal, 2016:4) yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengampunan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

**a. Dalam pelaksanaannya Pengampunan pajak dilaksanakan pada empat asas yaitu:**

- 1) Asas Kepastian Hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 2) Asas Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- 3) Asas Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Asas Kepentingan Nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

**b. Pengampunan Pajak Bertujuan Untuk:**

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak yang antar lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

**c. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak**

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- 2) Pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 UU RI No.16 Tahun 2016 ,diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU RI NO.16 tahun 2016, yaitu wajib pajak yang sedang:
  - Dilakukan penyelidikan dan berkas penyidikanyatelah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
  - Dalam proses peradilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menjalani hukum pidana, atas tindak pidana dibidnag perpajakan.
- 4) Pengampuna pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 UU RI No.16 Tahun 2016, meliputi pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
  - 5) Kewajiban perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 UU RI No.16 Tahun 2016, terdiri atas kewajiban:
    - Pajak penghasilan
    - Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Dari definisi dan penjelasan diatas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi adminitrasi, *tax amnesty* juga dimasukan untuk memnghapus sanksi pidana. *Tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya *tax amnesty* , perlu pertimbangan yang menjadi Justifikasi dari *tax amnesty* dan hingga batas mana *tax amnesty* dapat di justifikasi (Safrina,2016).

Menurut Safrina dkk, 2016 Pada umunya pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Pajak Dalam Jangka Pendek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan dan cenderung menurun sering kali menjadi alasan pembenaran dilakukannya *tax amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberika *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkat penerimaan pajak.

b. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Dimasa yang akan Datang

Permasalahn kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. para pendukung *tax amnesty* pada umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan.

c. Mendorong Reptariasi Modal atau Aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* diberlakukan merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir diluar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang parkir diluar negeri tersebut.

d. Transisi Ke Sistem Perpajakan yang Baru

*Tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas



penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

#### d. *Tax Amnesty* dalam Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan dan tujuan lainnya.

akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Dimana fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Penerapan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) juga berhubungan erat dengan akuntansi. Bersamaan dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah meluncurkan PSAK 70 Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. PSAK ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-undang *tax amnesty*. Tarkosunaryo dalam Noor dkk (2016) menjelaskan bahwa pengampunan pajak untuk wajib pajak pribadi tidak akan terdapat banyak permasalahan dalam akuntansinya, namun untuk wajib pajak badan usaha akan terdapat beberapa dampak akuntansi dan pelaporan keuangan akan menjadi kompleks. Dimana ketika wajib pajak badan melakukan kebijakan pengampunan pajak maka dampak yang akan muncul dalam laporan keuangan badan usaha

#### Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah adanya penambahan aset yang dicatat oleh badan usaha tersebut. Penambahan pengungkapan aset tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca .

### 2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian SPT dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, yaitu Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan prinsip *self assesment system*, wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelapor ini menggunakan surat pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak, atau dapat difotokopi. Macam-macam surat pemberitahuan (SKMK No. 534/KMK 04/2002) adalah :

1. SPT masa PPh Pasal 21/26
2. SPT masa PPh Pasal 22
3. SPT masa PPh Pasal 23/26
4. SPT masa PPh Pasal 25
5. SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2
6. SPT masa PPh Pasal 15
7. SPT masa pajak pertambahan nilai
8. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi PKP pedagang eceran
10. SPT masa pemotongan PPh atas bunga deposito /tabungan /diskon /SBR/ jasa giro
11. SPT masa PPh transaksi penjualan saham
12. SPT masa PPN dan PPnBM
13. SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S
14. SPT tahunan PPh wajib pajak badan pembukuan bahasa inggris
15. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT 1770 S.
16. SPT tahunan PPh Pasal 21 kode SPT 1721.

Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah :

1. memberikan data angka yang relevan dengan menghitung kenampajak.
2. menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)
4. melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan (wajib pajak penghasilan)
5. melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn dan PPnbm), bagi pengusaha kena pajak.

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jenis-jenis surat pemberitahuan tersebut adalah :

- a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
  - b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.
1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari :
- a. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
  - b. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22;
  - c. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
  - d. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15;
  - f. Surat Pemberitahuan Masa PPnBM;
  - g. Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut;
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan), adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari :
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak Badan (1771-Rupiah).
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US).
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain (1770).
  - d. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S).
  - e. Surat Pemberitahuan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS). Siti Resmi, (2014: 43).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Bagi wajib pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :
  - a. Pembayaran pajak atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/bukan objek pajak.
  - c. Harta dan kewajiban.
  - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sony ,dkk. (2006:150), mengatakan fungsi surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak sebagai berikut :

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus di bayar.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).
- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.

2. Bagi pengusaha kena pajak, adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah kena pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang di potong atau di pungut serta di setorkan. Herry Purwono, (2014: 33).

Untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian perpajakan, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara umum, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Tata cara pengisian dan penyampaian SPT di atur sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi
3. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, surat pemberitahuan dianggap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Siti Resmi, (2014: 45).

Wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, wajib pajak perlu melakukan administrasi SPT, langkah-langkah itu sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan cara *men-download* (mengunduh) format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jendral Pajak.
2. Wajib pajak wajib mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
  - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Lengkap, adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
  - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Wajib pajak menandatangani SPT yang telah diisi sebelum menyampaikan atau melaporkan. Penandatanganan yang dimaksud yang dilakukan secara biasa atau dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sama. Untuk SPT wajib pajak badan harus di tandatangani oleh salah seorang pengurus atau direksi.

4. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau melalui tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
5. SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jendral Pajak diberikan bukti penerimaan sebagai bukti penyampain SPT sesuai dengan tanggal penyampaian, sedangkan bukti pengiriman SPT yang di sampaikan melalui pos sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penerimaan SPT. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap. Herry Purwono, (2014: 33).

Penyerahan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi paling lambat adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan penyerahan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan paling lambat adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Supra Mono, dkk, (2010: 13). SPT wajib pajak disampaikan dengan batas waktu:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa waktu.
2. Untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling laa 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pembayaran pajak, jika batas waktu penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyampaian SPT dimajukan satu hari kerja sebelumnya. Terdapat kriteria tertentu wajib pajak yang dapat menyampaikan:

1. SPT Masa pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa maa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam masa pajak yang terakhir.
2. SPT selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak bersangkutan.

Yang dimaksud dengan wajib pajak kriteria tertentu meliputi:

- a. Wajib pajak usaha kecil, yang terdiri dari:
  - 1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yang memenuhi kriteria berikut:
    - a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
    - b. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp. 600.000.000.
  - 2) Wajib pajak badan, yang memenuhi kriteria berikut:
    - a. Modal wajib pajak 100% dimiliki oleh warga negara indonesia
    - b. Menerima atau memperoleh peredaran usaha dari tahun pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp. 900.000.000.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wajib pajak di daerah tertentu adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tata cara wajib pajak dengan kriteria tertentu yang bermaksud melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT, adalah:

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar.
2. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam SPT Masa yang meliputi beberapa.
3. Meneliti Masa pajak, atas pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh wajib pajak dan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

Pada prinsipnya SPT harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Apabila tidak paham karena kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan pajak). Wajib pajak mengisi SPT harus benar sesuai dengan kenyataan dan lengkap, apabila tidak, maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih lanjut akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya: 1. Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. 2. Pandai bercakap-cakap; petah lidah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai 1. Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Nurcholis (2007:263), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Pengertian kebijakan yang dikutip oleh Jones (1996:47) dalam tahir (2014) adalah: *"a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it"* Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Sementara itu Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Friedrich dalam Wahab (1991), mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.

Kartasmita dalam Edy Sutrisno (2009:15), mengatakan bahwa kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irfan Islami dalam Edy Sutrisno (2009:16), bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan
2. tindakan-tindakan dari Pemerintah.
3. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
4. Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
5. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi (2015:38-39), dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan

### 2.7 Implementasi

Menurut Abidin (2012: 146), Langkah implementasi dalam rangkaian proses kebijakan dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Fungsi aksi merupakan “fungsi tengah” yang berkaitan erat dengan fungsi awal seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pembenahan personnel (*staffing*) serta pengawasan (*controlling*) yang merupakan fungsi akhir. Begitu pula dengan implementasi yang berkaitan erat dengan langkah awal proses kebijakan seperti identifikasi permasalahan dan tujuan serta monitoring yang merupakan langkah akhir dalam rangkaian proses kebijakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahab (2012: 237), implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, salah satunya adalah pendekatan prosedural atau manajerial. Pendekatan ini melihat implementasi semata-mata masalah teknis atau manajerial. Prosedur yang dimaksud adalah yang menyangkut penjadwalan (*sche-dulling*), perencanaan (*planning*) dan penga-wasan (*control*). Maka tahap implementasi mencakup urutan langkah berikut:

- a. Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

## 2.6 Implikasi

Menurut M Irfan Islamy dalam bukunya prinsip-prinsip perusahaan kebijakan Negara (2002: 114-115) “Implikasi Adalah Segala Sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses proses perumusan kebijakan”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 114) implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu kebijakan yaitu implikasi dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

## **2.7 Tindak Lanjut**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tindak lanjut berarti langkah selanjutnya (tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya).

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dari tindak lanjut dalam penelitian ini ini adalah suatu rencana atau langkah selanjutnya yang dilakukan pasca selesainya pelaksanaan suatu kebijakan yaitu tindak lanjut yang dilakukan pasca pelaksanaan dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

## **2.8 Pajak Menurut Islam**

Dalam Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Max*, atau biasa juga disebut dengan *Adh-dharibah*, yang artinya adalah pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutan disebut *Shahibul Maks* atau *Al-Asysyar*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:



*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.*

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. Dimana zakat sebagai kewajiban umat muslim terhadap Agamanya, dan pajak sebagai kewajiban atas kepatuhan sebagai warga negara yang baik.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ngadiman dan Daniel huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	Variabel X: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Sunset Policy</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Sedangkan <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan Mohamad Noer (2016)	Analisis Penerapan <i>Tax Amnesty</i> Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara	Variabel X: <i>Tax Amnesty</i> Variabel Y: Peningkatan Penerimaan Negara	Indonesia dapat mempertimbangkan melakukan <i>Tax Amnesty</i> dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. <i>Tax Amnesty</i> ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				melanggar aturan. <i>Tax Amnesty</i> akan berhasil jika terdapat <i>justifikasi</i> yang kuat kenapa perlu adanya <i>Tax Amnesty</i> .
3	Putu Ade Setiawan, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarti (2017)	Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Berdasarkan Undanng-Undang No 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Variabel : pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Berdasarkan Undanng-Undang No 11 Tahun 2016	Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak sebanyak 126 wajib pajka badan dan 1.164 wajib pajak orang pribadi terhitung hingga priode II pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak .
4	I Made Bagiada dan I Nyoman Darmayasa (2016)	<i>Tax Amnesty</i> Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela		<i>Tax amnesty</i> menjadi suatu kebijakan yang didasari oleh niat yang tulus untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang denganmemberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebijakan untuk menari WP dari luar Negri ke dalam Negeri.
5	Desak Putu Ayu Diah Dewantari, Gde Emi Sulindawati , dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2017)	Evaluasi Program Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilaya Kerja Kantor Pelayana Pajak Pratama Singaraja	Variabel X: Evaluasi Program Pengampunan Pajak Variabel Y: Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukan implikasi positif dari program tax amnesty antara lain meningkatkan penerimaan Negara , melahirkan objek pajak baru, terjaminya rahasia wajib pajka baru, pengapusan pajak yang terhutang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. tidak ada implikasi negatif dari program pengampunan pajak ini.
6	Ferry Alberto (2015)	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) oleh pemerintah terhadap Potensi Peningkatan	Variabel X: Kebijakan Pengampunan Pajak Variabel Y:	Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dengan dilaksankanya <i>Investigation Amnesty</i> . Yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015	Petensi Peningkatan Penerimaan Pajak	telah sukses dibeberapa negara lain. Namun, pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan Rancangan undang-undang tersebut dan mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
--	--	--------------------------------------	--

Sumber data: penelitian terdahulu

